

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari bahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, serta saran yang akan disampaikan dalam penerapan sistem informasi akuntansi pengelolaan alat dan obat kontrasepsi pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

5.1. Kesimpulan

Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat merupakan instansi yang memiliki persediaan Alat dan Obat Kontrasepsi yang akan diterima, dilaporkan, disalurkan dan dihapuskan pada beberapa periode tertentu. Dalam pelaksanaannya, semua kegiatan atas persediaan Alat dan Obat Kontrasepsi dilakukan oleh beberapa pemegang kuasa dan penanggung jawab atas terjadinya pelaksanaan SOP. Berikut adalah kesimpulan terkait penerapan system informasi akuntansi pengelolaan alat dan obat kontrasepsi pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

1. Prosedur pelaksanaan SOP Persediaan Alat dan Obat Kontrasepsi pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat sudah dilaksanakan dengan menggunakan kombinasi dari sistem manual dan komputerisasi dengan tepat dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, sehingga untuk pengelolaan alat dan obat kontrasepsi. Dengan adanya sistem yang akurat, setiap proses dan pengelolaan alat dan obat kontrasepsi lebih terstruktur dan lebih memudahkan

setiap bidang Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan bagiannya masing-masing.

2. Pelaksanaan kegiatan SOP sesuai dengan porsi dan tanggung jawab masing-masing pemegang kuasa, sehingga pelaksanaan tanggung jawab sesuai dengan apa yang telah diberikan dan dilakukan dengan maksimal serta dokumen yang digunakan jelas dan terverifikasi sehingga dapat dilakukan pertimbangan dan pengambilan keputusan setiap SOP yang dilaksanakan.
3. Adanya pemisahan tanggung jawab antara Bendahara Materil dengan tim yang dibentuk oleh Kepala Perwakilan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan SOP tim hanya sebagai penyalur dari pelaksanaan SOP dan Bendahara Materil sebagai pencatat dan pelapor dalam kegiatan SOP, serit adanya SK dalam kegiatan pengelolaan alat dan obat kontrasepsi sehingga para pelaksana kegiatan memiliki tanggung jawab yang sesuai pada SOP yang dilaksanakan.
4. Persediaan Alat dan Obat Kontrasepsi digolongkan kepada Barang Milik Negara (BMN). Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat mengakui persediaan Alat dan Obat Kontrasepsi pada saat barang telah diinput pada aplikasi persediaan (UAKPB).
5. Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat melakukan pengendalian internal melalui kegiatan *stock opname* pada akhir bulan dan setiap semester. Pelaksanaannya dilakukan setiap akhir bulan oleh Bendahara Materil yang didampingi oleh Sub Koordinator Keuangan dan BMN, sedangkan dalam pelaksanaan setiap semester dilaksanakan oleh Tim *Stock Opname* yang memiliki surat tugas dari Kuasa Pengguna Barang (Kepala Perwakilan).

Pengendalian yang telah diterapkan tentu perlu untuk dipantau dan di evaluasi melalui unsur pemantauan pengendalian seperti dengan adanya SOP atas setiap kegiatan.

6. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan alat dan obat kontrasepsi berupa kelengkapan dokumen, waktu dalam pelaksanaan *stock opname* dan juga kesalahan penginputan data.
7. Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat menyajikan dan mengungkapkan persediaan Alat dan Obat Kontrasepsi dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan mengenai pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi pada Alat dan Obat Kontrasepsi di Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh instansi guna meningkatkan kinerja pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. SOP yang ada disarankan agar terus diperbaiki, untuk itu dilakukan penyempurnaan SOP terkait sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan persediaan alat dan obat kontrasepsi pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.
2. Perlunya pertinggalan dokumen (Arsip) untuk setiap kegiatan, sehingga adanya bukti fisik untuk bukti dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Perlu adanya pengawasan dan pengendalian internal rutin yang dilakukan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat terhadap alat dan obat kontrasepsi agar dalam pengelolaannya dapat dilaporkan dengan baik dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

